

Monthly Report

**Badan Pengarah Papua Provinsi
Papua Barat**

Februari 2025

Sekretariat Badan Pengarah Papua



APBN Regional Papua Barat

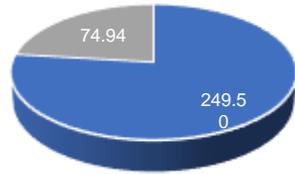
Pendapatan Negara
Rp 249,501 miliar

Belanja Negara
Rp 2.121,71 miliar

Defisit Anggaran
(Rp 1.872,21 miliar)

- ❖ **Pajak Dalam Negeri** didominasi oleh PPH Nonmigas (PBB) dan PPN
- ❖ **PNBP** berkontraksi karena adanya penurunan pendaaotan BLU 11,09 persen
- ❖ **Belanja K/L** didominasi Belanja pegawai.
- ❖ **Transfer Ke Daerah** didominasi oleh DAU *Block Grant* untuk belanja ASN Pemda

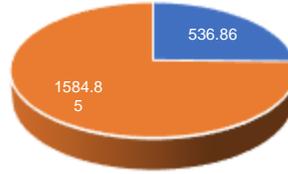
Pendapatan Negara



■ Pajak DN ■ PNBP

Pajak DN	249,50
Pajak LN	-
PNBP	74,94

Belanja Negara



■ Belanja KL ■

Belanja K/L	536,86
Transfer Ke Daerah (TKD)	1.584,85

dalam miliar rupiah
Sumber: OMSPAN (diolah)



Indikator Percepatan Pembangunan Papua Barat dalam RIPP 2024

PAPUA CERDAS

INDIKATOR	Baseline (2022)	Capaian (2024)	Target (2041)
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,21	13,17 ▲	14,59 - 16,61
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,84	7,86 ▲	9,36 - 10,37

PAPUA PRODUKTIF

INDIKATOR	Baseline (2021)	Capaian (2024)	Target (2041)
Tingkat Kemiskinan	21,33%	21,09% ▼	5,81% - 2,82 %
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,37%	4,13% ▼	4,11 % -1,73%
Realisasi Investasi PMDN	Rp919,07 M	Rp 8.074,1 M ▲	Rp92,3 - Rp174,5 Triliun

PAPUA SEHAT

INDIKATOR	Baseline (2021)	Capaian (2024)	Target (2041)
Umur Harapan Hidup (UHH)	66,46	68,47 ▲	68,66 - 68,67
Tingkat Prevalensi Stunting	30,00	13,97% ▲	<10%
Indeks Pembangunan Manusia	65,89	6	N/A

Sumber Data: RIPP, BPS, Kemendagri, dan BKPM (diolah)

Permasalahan dan Rekomendasi

Permasalahan/Kendala

Masih terbatasnya penyediaan layanan kesehatan, jumlah tenaga kesehatan, serta pemanfaatan sarpras penunjang layanan kesehatan di Papua Barat khususnya di daerah terpencil

Distribusi tenaga pendidik yang belum merata, keterbatasan sarana dan layanan pendidikan, serta rendahnya literasi dan numerasi siswa, terutama OAP, menghambat kualitas pendidikan.

Keterbatasan jaringan internet, pendataan OAP yang belum optimal, dampak efisiensi anggaran terhadap proyek pembangunan, dan ketidaktersediaan pengolahan CPO, menjadi tantangan utama di Papua Barat

Papua Barata merupakan daerah dengan tingkat gangguan keamanan tertinggi dan belum adanya optimalisasi pemetaan batas wilayah guna menghindari terjadi konflik sosial yang

Rekomendasi

Pengembangan SDM, pembentukan lembaga teknis di bidang Kesehatan dan perbaikan sistem jaminan Kesehatan serta peningkatan dan pemaksimalan fungsi sarpras di daerah

Revitalisasi tenaga pendidik, pembangunan sarana pendidikan, penyediaan kader Calistung, dan percepatan pendidikan guru melalui RPL menjadi langkah strategis dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Perlu memperkuat jaringan internet, mempercepat pendataan OAP, mengakomodasi aspirasi asosiasi, mendukung koperasi sawit rakyat,

Perlu menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Papua Barat, dengan koordinasi ditingkatkan baik antar masyarakat maupun penegak hukum yang adil



Kegiatan Strategis

PAPUA SEHAT



Rapat Sinkronisasi Kegiatan dengan Dinas Kesehatan Kab. Manokwari

PAPUA CERDAS



Rakornis Sinkronisasi dan Harmonisasi Renja Pendidikan bersama Dinas Pendidikan Prov/kab/kota di Papua Barat

PAPUA PRODUKTIF



BP3OKP PB Menerima Aspirasi dari Asosiasi Kontraktor OAP terkait Efisiensi Anggaran Infrastruktur

PAPUA POLHUKAM



Audiensi Bersama Bappeda Kabupaten Kaimana, dalam rangka Sinkronisasi dan Koordinasi program kerja BP3OKP-RI Papua Barat

Indikator Pembangunan Papua Sehat

Umur Harapan Hidup (UHH)

▲ 68,47

Baseline (2022): 66,46
Target (2024): 66,52



Prevalensi Stunting

▲ 13,97%

Baseline (2022): 30,00
Target (2024): 14,00



Eliminasi Malaria

0 Kab/Kota
Tahun 2023

Baseline (2022): N/A
Target (2024): N/A



Indeks Pembangunan Manusia

▲ 67,47%

Baseline (2022): 65,89
Target (2024): 66,81-67,04

Sumber Data: RIPP, BPS, Kemendagri, dan BKPM, Diskominfo PB, Profil Kesehatan Indonesia 2023 (diolah)

Kendala/Permasalahan

1. Hambatan Sistem pelayanan seperti kesulitan layanan di daerah terpencil dan keterbatasan fasilitas medis;
2. Permasalahan SDM di Bidang Kesehatan seperti keterbatasan dokter tetap dan spesialis sehingga menyebabkan pelayanan terbatas;
3. Kendala sosial dan budaya seperti kepercayaan terhadap “suanggi” dan keengganan rujukan rumah sakit;
4. Di Pegaf (anggi), pelayanan Kesehatan puskesmas pasif
5. Rumah sakit pratama: belum rawat inap
6. Dinas kesehatan: gedung ada, belum beroperasi

Rekomendasi

1. Pengembangan SDM di Bidang Kesehatan seperti Program beasiswa dokter papua, sistem rekrutmen tenaga medis lokal dan pemberian insentif dokter daerah 3T;
2. Pembentukan lembaga teknis daerah, seperti UPTD program papua sehat;
3. Peningkatan dan pemaksimalan sarpras Kesehatan seperti Fungsikan gedung dinas kesehatan KAB .PEGAF, Fungsikan dan maksimalkan puskesmas masabui, oransbari dan ransiki
4. Sistem jaminan Kesehatan, seperti pembentukan UPTD jaminan kesehatan daerah dan mampu mendaftarkan masy. OAP tidak mampu sebagai PBI
5. Alokasi APBD untuk jaminan kesehatan masyarakat papua

Kegiatan Strategis



Rapat Sinkronisasi Kegiatan dgn Dinas Kesehatan Kab. Manokwari



Monitoring dan Evaluasi Kesehatan di Kab. Manokwari Selatan



Monitoring dan Evaluasi Kesehatan di Kab. Pegunungan Arfak

Indikator Pembangunan Papua Cerdas

Harapan lama sekolah (HLS) (tahun)

▲ **13,17**
Naik 0,01 tahun (yoy)

Baseline (2022): 13,21
Target (2024): 13,65

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)

▲ **7,86**
Naik 0,20 tahun (yoy)

Baseline (2022): 7,84
Target (2024): 8,00

Sumber Data: RIPP, BPS, Kemendagri, dan BKPM (diolah)

Catatan:

Terjadinya kenaikan kinerja capaian Indikator, dikarenakan:

- **Meningkatnya kesadaran warga** tentang pentingnya peran pendidikan untuk masa depan generasi yang akan datang, dan
- **Pemerintah Daerah responsif** untuk menyiapkan berbagai sarana dan prasarana penunjang Pendidikan di setiap daerah.

Kendala/Permasalahan

1. Kuantitas tenaga Pendidik yang belum terdistribusi secara merata & maksimal;
2. Kesulitan dalam mengakses layanan Pendidikan, karena kurangnya sar-pras pendidikan di setiap sekolah dan belum optimalnya layanan Pendidikan;
3. Rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa terutama OAP dengan baik.
4. Kualitas tenaga pendidik yang belum mencapai standar

Rekomendasi

1. Revitalisasi tenaga pendidik ke satuan pendidikan;
2. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan;
3. Perlu didukung pembentukan/penyediaan kader kelompok Calistung (Membaca, Menulis, dan Menghitung) di setiap lingkungan dengan fasilitas penunjang; dan
4. Percepatan Pendidikan guru 2 tahun melalui program RPL ⇒ Kemendikbud no. 44 tahun 2023.

Kegiatan Strategis



Rakornis Sinkronisasi dan Harmonisasi Renja Pendidikan



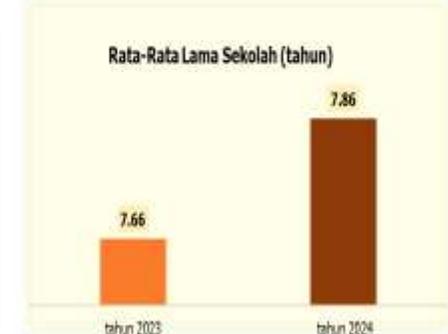
Kunjungan Lapangan Sarana dan Prasarana pendidikan di Kab. Manokwari Selatan



Kunjungan Lapangan untuk Upaya Revitalisasi Tenaga Pendidikan



Kunjungan Kerja ke Dinas Pendidikan Papua Barat



Indikator Pembangunan Papua Produktif

Tingkat Kemiskinan

▼ **21,66 %**

Turun 0,57% terhadap Maret '24

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

▼ **4,13 %**

Turun 0,05% (yoy)

Baseline (2022): 5,37
Target (2024): 4,24-4,95



Realisasi Investasi (PMA & PMDN)

▲ **Rp 8.074,1**
miliar

Baseline (2021): Rp919,07 M
Target (2041): Rp92,3 - Rp174,5 T



Sumber Data: RIPP, BPS, Kemendagri, dan BKPM (diolah)

Kendala/Permasalahan

1. Keterbatasan Signal jaringan internet di daerah serta Belum maksimalnya pendataan data kependudukan khususnya OAP di seluruh kabupaten
2. Menerima Unjuk rasa dari asosiasi kontraktor Orang Asli Papua (OAP) yang berpendapat bahwa kebijakan efisiensi anggaran oleh presiden (Prabowo) akan sangat berpengaruh pada proyek pembangunan fisik di Papua yang akan mengurangi kegiatan pembangunan.
3. Hasil tandang buah segar kelapa sawit rakyat di Warmare, Prafi, Masni dan Sidey di Kabupaten Manokwari tidak tertampung untuk pengolahan menjadi CPO
4. Lahan di pegunungan Arfak sangat cocok untuk perkebunan kopi arabika tetapi pertumbuhannya sangat lambat sekalipun sudah ada petani milenial yang sudah mengawali kegiatan perkebunan mulai dari penyiapan bibit, kebun percontaan sampai dengan pengolahan bubuk kopi (*Package dan Packaging*)

Rekomendasi

1. Menginfetarisir wilayah, kecamatan dan kampung yang masih belum kuat jaringan internet dan Dinas dukcapil Segera melakukan pendataan OAP secara berjenjang mulai dari kampung, kecamatan, kabupaten.
2. Usul dan saran kelompok unjuk rasa di akomodir dengan baik, menjelaskan kepada perakilan dari Asosiasi.
3. Masyarakat mengorganisir diri dalam badan usaha berbentuk koperasi untuk mengajukan kepada pemerintah agar mendapat bantuan pemerintah pusat dari dana sawit nasional untuk pemeliharaan sawit rakyat dan pengusulan untuk menjadikan pabrik.
4. Dinas pertanian di arab untuk segera membuat program pengembangan perkebunan kopi arabika pegunungan arfak karena pasar internasional yang terbuka.

Kegiatan Strategis



Pembahasan data OAP bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Papua Barat



BP3OKP PB Menerima Aspirasi dari Asosiasi Kontraktor OAP terkait Efisiensi Anggaran Infrastruktur



Kunjungan kerja Papua Produktif Ke Dinas Pertanian Provinsi terkait Koperasi Kelapa sawit



Kunjungan Kerja ke salah satu Pengusaha Milenial Kopi Arabika Pegunungan Arfak

Indikator Pembangunan Papua Polhukam/Papua Damai

Indeks Kemanan
Papua Barat

▼ **6,57 %**



Kapasitas Lembaga
Keamanan Papua Barat

▼ **5,69%**



Sumber Data: RIPPP, BPS, Kemendagri, dan BKPM (diolah)

Kendala/Permasalahan

1. Dengan adanya Inpres No 1 Tahun 2025, dinilai dapat menimbulkan persoalan baru terkait hak-hak Kontraktor OAP serta bertentangan dengan Perpres Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).
2. bahwa Papua merupakan daerah dengan kewenangan Otonomi Khusus sehingga Inpres Nomor 1 Tahun 2025 perlu ditinjau Kembali sebab dinilai menghambat percepatan pembangunan Papua
3. DOB Kabupaten Manokwari Barat sudah sejak lama masuk agenda pemekaran DOB, namun beberapa persoalan internal yang dihadapi dapat menghambat proses pemekaran tersebut.
4. Pemetaan batas wilayah masyarakat adat di Provinsi Papua Barat perlu didukung guna mencegah terjadinya konflik sosial antar masyarakat adat setempat. Terutama mengenai batas-batas wilayah adat.
5. Papua Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat gangguan keamanan tertinggi, sehingga perlu adanya upaya yang dibangun berupa koordinasi dari berbagai stakeholder salah satunya yaitu BP3OKP dengan pihak penegak hukum.

Rekomendasi

1. Perlu ditinjau Kembali Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran di kementerian/Lembaga.
2. Pemekaran DOB Kab. Manokwari dan beberapa DOB lainnya di Provinsi Papua Barat segera dimekarkan guna mempercepat pembangunan serta meminimalisir kesenjangan social masyarakat dan mempercepat kebutuhan pelayanan warga, khususnya Orang Asli Papua
3. Pemetaan batas wilayah harus dilakukan oleh masyarakat adat wilayah lain di Papua Barat, guna menghindari konflik tentang batas wilayah masyarakat adat dikemudian hari
4. Demi menciptakan kemanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Papua Barat, maka koordinasi perlu ditingkatkan baik antar masyarakat maupun penegak hukum yang adil.
5. Perlu diaktifkan Kembali poskamling di lingkungan RT/RW masing-masing di Provinsi Papua Barat

Kegiatan Strategis



Menerima Audiens dari Koalisi Kontraktor Orang Asli Papua Provinsi Papua Barat terkait Efisiensi Anggaran di Kementerian/Lembaga



Menerima Aspirasi Tim Pemekaran DOB Kabupaten Manokwari Barat



Sambutan anggota Pokja Papua Polhukam di acara pembukaan Kegiatan Musyawarah Adat Suku Miere, Kampung Kiruru, Distrik Teluk Etna, Kabupaten Kaimana



Audiensi Bersama Bappeda Kabupaten Kaimana, dalam rangka Sinkronisasi dan Koordinasi program kerja BP3OKP-RI Papua Barat

Terima Kasih